

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembingkaihan isu inklusivitas dan ketimpangan akses beasiswa LPDP pada pemberitaan Kompas.com edisi Februari 2026, menyusul polemik kasus alumni berinisial DS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing model Entman melalui empat elemen utama: *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgments*, dan *suggest remedies*. Data penelitian diperoleh melalui teknik studi dokumentasi pada 10 artikel terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com mengonstruksi isu ini sebagai krisis akuntabilitas moral sekaligus cerminan kegagalan sistemik pemerintah dalam mengelola redistribusi hasil investasi pendidikan. Media menyoroti adanya ketimpangan akses yang didominasi oleh kelompok elitis serta menuntut penegakan aturan yang tegas sebagai bentuk keadilan distributif. Kesimpulannya, inklusivitas program LPDP perlu dijaga melalui reformasi tata kelola dan penguatan pengawasan sistemik, bukan melalui kebijakan reaktif yang justru mengancam keberlanjutan investasi SDM negara bagi kelompok marginal.

Kata Kunci: Analisis Framing, LPDP, Inklusivitas, Ketimpangan Akses, Kompas.com.

ABSTRACT

This study aims to analyze the framing of inclusivity and access inequality issues in Kompas.com's February 2026 coverage, following the controversy surrounding the case of an alumnus identified by the initials DS. This study employs a qualitative approach using Entman's framing analysis model, consisting of four main elements: defining problems, diagnosing causes, making moral judgments, and suggesting remedies. The research data were obtained through a documentation study of 10 selected articles. The results show that Kompas.com constructs this issue as both a crisis of moral accountability and a reflection of the government's systemic failure in managing the redistribution of educational investment returns. The media highlights access inequality—dominated by elite groups—and demands strict regulatory enforcement as a form of distributive justice. In conclusion, the inclusivity of the LPDP program must be maintained through governance reforms and the strengthening of systemic oversight, rather than through reactive policies that threaten the sustainability of the state's human capital investment for marginalized groups.

Keywords: Framing Analysis, LPDP, Inclusivity, Inequality of Access, Kompas.com.